



Kementerian Agama

KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT KEGIATAN

Kode>Nama Satker	: 423390/KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
Nama Unit Kerja	: Sekretariat Jenderal
Nama Kegiatan	: Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian TLHP
Tahun Pelaksanaan	: 2021
Tujuan Kegiatan	: Terlaksananya kegiatan Perjalanan Dinas secara akuntabel
Jenis Kegiatan	: Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas (Perjadin)

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	RINCIAN PENANGANAN		RENCANA PENANGANAN	
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
1	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Penetapan kegiatan tidak mengacu pada sasaran strategis dan IKU unit kerja	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja PEMILIK RISIKO: PPK	Peraturan perjalan Dinas KEEFEKTIFAN: Efektif	Verifikasi dan validasi TOR	Kabag Tata Usaha	Agustus 2021
2	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Perencanaan penyusunan program kerja tahunan kurang matang	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja PEMILIK RISIKO: PPK	SOP dan Scheadule Time KEEFEKTIFAN: Efektif	Validasi dan verifikasi	Kasuubag Ortala dan KUB	3 Hari
3	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Penyusun TOR dibuat oleh pegawai yang tidak memahami substansi kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan PEMILIK RISIKO: PPK	Nota Dinas Pimpinan KEEFEKTIFAN: Efektif	verifikasi dan validasi	Kasuubag Ortala dan KUB	3 Hari

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	RINCIAN PENANGANAN		RENCANA PENANGANAN	
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
4	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam penyusunan TOR kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan PEMILIK RISIKO: PPK	SK Kegiatan KEEFEKTIFAN: Efektif	Verifikasi dan validasi	Kasuabag Ortala dan KUB	3 Hari
5	Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM PENYEBAB: Penyusun RAB tidak memahami standar biaya yang berlaku	Rencana biaya tidak dapat dibayarkan PEMILIK RISIKO: PPK	PMK Nomor 19 Tahun 2021 tentang SBM KEEFEKTIFAN: Efektif	DIPA dan SMB	Bendahara Pengeluaran	3 Hari
6	Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam penyusunan RAB kegiatan	Rencana biaya tidak dapat dibayarkan PEMILIK RISIKO: PPK	PMK Nomor 19 Tahun 2020 tentang SBM KEEFEKTIFAN: Efektif	Verifikasi dan Validasi	PPK	3 Hari
7	Surat Tugas dan SPD dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan PENYEBAB: Perencanaan kegiatan tidak matang	Proses administrasi kegiatan terhambat PEMILIK RISIKO: PPK	Surat Tugas KEEFEKTIFAN: Efektif	validasi dan nomor surat	Kasubag Ortala dan KUB	3 Hari
8	Surat Tugas dan SPD dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam setiap perencanaan kegiatan	Segala Pembiayaan kegiatan tidak dapat dibayarkan PEMILIK RISIKO: PPK	PMK Nomor 19 Tahun 2020 tentang SBM 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Validasi dan verifikasi	Kasubag Ortala dan KUB	3 Hari
9	Surat Tugas dan SPD dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam setiap perencanaan kegiatan	Segala Pembiayaan kegiatan tidak dapat dibayarkan PEMILIK RISIKO: PPK	PMK nomor 19 Tahun 2020 tentang SBM 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Validasi dan verifikasi	PPK	2 Hari
10	Penetapan petugas monitoring tidak sesuai dengan RAB (melebihi RAB) PENYEBAB: Penyusun Surat Tugas tidak memperhatikan TOR dan RAB kegiatan (TOR tidak dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan)	Pembayaran melebihi RAB PEMILIK RISIKO: PPK	DIPA / RKKL KEEFEKTIFAN: Efektif	RAB dan Surat Tugas	PPK	3 Hari

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	RINCIAN PENANGANAN		RENCANA PENANGANAN	
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
11	<p>Penetapan petugas monitoring tidak sesuai dengan RAB (melebihi RAB)</p> <p>PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan revidu dengan teliti dalam penyusunan Surat Tugas</p>	<p>Pembayaran melebihi RAB</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>DIPA dan POK</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p>	<p>Verifikasi dan validasi</p>	<p>Kasuubag Ortala dan KUB</p>	<p>2 Hari</p>
12	<p>Surat Tugas ditandatangani oleh pejabat yang tidak sesuai dengan kewenangannya</p> <p>PENYEBAB: Penyusun Surat Tugas tidak memahami kewenangan pejabat terkait penandatanganan Surat Tugas</p>	<p>Segala pembiayaan kegiatan tidak dapat dibayarkan</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Surat Tugas dan SPD</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p>	<p>DIPA dan POK</p>	<p>PPK</p>	<p>3 hari</p>
13	<p>Surat Tugas ditandatangani oleh pejabat yang tidak sesuai dengan kewenangannya</p> <p>PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan revidu dengan teliti dalam penyusunan SK kegiatan</p>	<p>Segala pembiayaan kegiatan tidak dapat dibayarkan</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>	<p>Kabag TU</p>	<p>3 hari</p>
14	<p>Perjadi tidak tepat sasaran dan Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan bukan oleh pegawai yang kompeten (tidak sesuai tugas fungsinya)</p> <p>PENYEBAB: PPK dan penanggung jawab kegiatan tidak cermat dalam menyusun perencanaan</p>	<p>Berpotensi merugikan negara/pemborosan</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Anjab dan Tusi Pegawai</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p>	<p>Validasi dan verifikasi, Matrik temuan TLHP</p>	<p>Kepala Kantor dan PPK</p>	<p>3 hari</p>
15	<p>Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas (misal: pembayaran uang harian/hotel/transport melebihi SBM, Kelebihan pembayaran biaya hotel (tugas 3 hari, hotel juga 3 hari), Terdapat pembayaran ganda, Pembayaran transport lokal tidak sesuai ketentuan)</p> <p>PENYEBAB: PPK dan Penanggung jawab kegiatan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pencairan anggaran perjalanan dinas.</p>	<p>Berpotensi merugikan negara</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p>	<p>validasi dan verifikasi</p>	<p>PPK</p>	<p>3 hari</p>

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	RINCIAN PENANGANAN		RENCANA PENANGANAN	
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
16	Perjalanan dinas fiktif PENYEBAB: PPK dan Penanggung jawab kegiatan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pencairan anggaran perjalanan dinas.	Berpotensi merugikan negara PEMILIK RISIKO: PPK	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Dokumentasi Kegiatan	Kasubbag Ortala dan KUB	2 hari
17	Laporan perjadiin terlambat/tidak dibuat PENYEBAB: Tidak ada kebijakan tertulis yang mewajibkan pembuatan laporan dengan batasan waktu tertentu bagi pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas.	- Pelaksanaan tugas melalui perjalanan dinas sulit dievaluasi diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya; - Saran yang diberikan oleh tim perjalanan dinas berpotensi tidak up to date; - Tindak lanjut atas hasil kegiatan perjalanan dinas berpotensi tidak berpengaruh besar terhadap pelaksanaan program yg sama di tahun berikutnya. PEMILIK RISIKO: PPK	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Laporan kegiatan	Tim TLHP	7 hari

Rangkulu, 23 Desember 2021

Pemilik Risiko,

(Brs. H. Hamdani, M.Pd)

NIP 196811071997031007